



## WALI KOTA TANGERANG SELATAN

Ciputat, 10 Agustus 2021

Kepada Yth.

1. Kepala / pimpinan lembaga/ instansi vertikal;
2. Rektor, Direktur, dan ketua lembaga pendidikan tinggi, kepala dan pengelola satuan pendidikan menengah/ dasar serta pendidikan nonformal;
3. Pengurus dan pengelola rumah ibadah;
4. Kepala perangkat daerah, camat dan lurah;
5. Pimpinan perusahaan/ asosiasi serta pelaku usaha;
6. Pengurus dan Pengelola/ pemilik/ pengendara transportasi umum;
7. Pengelola fasilitas umum/ sosial/ budaya;
8. Ketua RT/RW dan Masyarakat; dan
9. Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Di

Tangerang Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR 443/2785/Huk

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kota Tangerang Selatan sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021. Untuk itu kepada setiap orang yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di:
  - a. lembaga pendidikan tinggi;
  - b. pendidikan non formal antara lain Kelompok Bermain (PAUD), Tempat Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Satuan Pendidikan sejenis;
  - c. pendidikan formal antara lain TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA,
  - d. lembaga pelatihan;
  - e. lembaga penelitian;
  - f. lembaga pembinaan; dan
  - g. lembaga sejenisnyadilakukan pembelajaran secara dalam jaringan (daring)/online.
2. Kegiatan bekerja:
  - a. Sektor non esensial diberlakukan *Work From Home (WFH)* sebesar 100% (seratus persen);
  - b. Sektor esensial pada bidang:
    - keuangan dan perbankan yang meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)), diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* untuk pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) staf WFO;
    - pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, serta perhotelan non penanganan karantina, diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)*; dan
    - industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.

- c. Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat.
  - d. Sektor kritikal pada bidang:
    - kesehatan, keamanan, dan ketertiban diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat;
    - energi, logistik dan transportasi, makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* pada fasilitas produksi, konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO.
3. Kegiatan usaha perdagangan pada :
- a. pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, pasar swalayan dan apotik/toko obat/optik dapat diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat serta kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan tetap dilaksanakan.
  - b. pasar rakyat yang menjual kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, mulai beroperasi pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
  - c. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, mulai beroperasi pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
  - d. supermarket, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, mulai beroperasi pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
  - e. apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Restoran/rumah makan dan cafe, yang berada dalam gedung/toko tertutup, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall, hanya menerima *delivery/take away* dan tidak makan di tempat (*dine-in*) dengan jam operasional mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
5. Restoran/rumah makan dan café, dengan area pelayanan terbuka, dapat beroperasi mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan kapasitas makan di tempat (*dine in*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
6. Warung makan, warung nasi, warteg, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan dapat beroperasi mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan kapasitas makan di tempat (*dine in*) paling banyak 3 (tiga) orang, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan waktu makan paling lama 20 (dua puluh) menit, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
7. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *laundry*, pencucian kendaraan, pangkas rambut/*barbershop*, pedagang asongan, bengkel kecil, dan usaha kecil yang sejenis dapat beroperasi mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
8. Kegiatan pelaksanaan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
9. Tempat ibadah atau rumah ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
10. Kegiatan di fasilitas umum di:
  - a. lokasi seni dan budaya;
  - b. sarana dan prasarana olahraga;
  - c. gelanggang/kolam renang;
  - d. ruang publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya; dan
  - e. kegiatan sosial (antara lain perayaan ulang tahun, arisan, dan sejenisnya),yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, ditutup sementara.

11. Transportasi umum di:
  - a. kendaraan umum;
  - b. angkutan masal;
  - c. taksi (konvensional dan online); dan
  - d. kendaraan sewa/rental,diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
12. Akad nikah untuk semua agama dapat diselenggarakan dengan pembatasan kapasitas undangan paling banyak 20 (dua puluh) orang dan tidak makan ditempat (*dine in*), dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
13. Pelaksanaan resepsi pernikahan dan resepsi khitanan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4.
14. Perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh yang menggunakan pesawat udara, bis, dan kereta api:
  - a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama);
  - b. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - c. ketentuan huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
  - d. Supir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
15. Pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
  - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

17. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis operasional diatur dengan Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah dan/atau Instruksi Kepala Perangkat Daerah pada jajarannya sesuai dengan kewenangan, bidang tugasnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**WALI KOTA TANGERANG SELATAN,**



**BENYAMIN DAVNIE**

Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Banten
  2. Yth. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan;
  3. Yth. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan;
  4. Yth. Komandan Distrik Militer 0506 Tangerang;
  5. Yth. Kepala Kepolisian Resor Tangerang Selatan;
  6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
  7. Yth. Ketua Pengadilan Agama Tangerang;
  8. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
  9. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
  10. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan;
  11. Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan; dan
  12. Yth. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan.
-